

Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Sekolah dan Masyarakat (Studi Kasus Sekolah Kharisma Makassar)

Analysis of Inclusive Education Policies School and Community (Case Study of Makassar Kharisma School)

Arnita Soevian¹, Agustan², Nasir³

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti & arnitasoevian87@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti & agustanagustan@unpacti.ac.id

³Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti & nasirsaja113@gmail.com

Corresponding Author: arnitasoevian87@gmail.com

Article Info

Abstract/ Abstrak

Article History:

Received: xxxxxx

Revised: xxxxxx

Accepted: xxxxxx

Keyword:

Education Policy;
Inklusif Education;
Kharisma School.

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan;
Pendidikan Inklusif;
Sekolah Kharisma.

Inclusive education is an effort to provide opportunities for students with special needs to learn together with other students in public schools. This research aims to analyze inclusive education policies for schools and society, with a focus on the Kharisma Makassar School. Through a qualitative approach, this research explores the impact of inclusion policies, policy implementation, as well as supporting and inhibiting aspects. The research results show that the full inclusion model is used at Kharisma School, where students with special needs are combined in one class with regular students. Special accompanying teachers help in adapting the curriculum and providing special guidance to students with special needs. Supporting factors in implementing inclusion include the commitment of schools and foundations, while inhibiting factors include limited human resources, finances, facilities and infrastructure, as well as lack of community participation. By understanding these factors, it is hoped that we can increase the effectiveness of inclusive education at the Kharisma Makassar School and other schools.

Pendidikan inklusi merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusif terhadap sekolah dan masyarakat, dengan fokus pada Sekolah Kharisma Makassar. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi dampak kebijakan inklusi, penerapan kebijakan, serta aspek pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model inklusi penuh digunakan di Sekolah Kharisma, di mana peserta didik dengan kebutuhan khusus digabungkan dalam satu kelas dengan peserta didik reguler. Guru pendamping khusus membantu dalam menyesuaikan kurikulum dan memberikan bimbingan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Faktor pendukung dalam penerapan inklusi meliputi komitmen sekolah dan yayasan, sementara faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan pemahaman terhadap faktor-faktor ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan inklusi di Sekolah Kharisma Makassar dan sekolah lainnya.

PENDAHULUAN

Pendidikan Inklusi merupakan pendidikan dimana peserta didik yang berkebutuhan khusus atau difabel, (memiliki keterbatasan seperti keterbelakangan mental, fisik, dll) di beri kesempatan untuk bersekolah di sekolah umum dan bergabung

dengan peserta didik lainnya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa bersekolah dimana saja, di sekolah umum maupun sekolah luar biasa. Seperti yang dicantumkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 32 yang menyebutkan bahwa, Indonesia memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau difabel untuk mengikuti proses pembelajaran karena walaupun mereka memiliki kekurangan dalam hal fisik, emosional dan mental, mereka pasti memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang terpendam. Itu berarti anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak biasanya dan tidak dibeda-bedakan.

Melalui penggabungan kelas antara murid berkebutuhan khusus dan murid biasa, maka murid berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan ukuran kenyamanan atau kemudahan dengan fasilitas dan tempat yang mendukung untuk semua murid tanpa terkecuali. Sistem tersebut juga membantu murid berkebutuhan khusus untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang normal lainnya sehingga ini bisa menjadi *point plus* untuk kehidupannya yang akan datang. Sebab akan ada waktunya anak-anak yang berkebutuhan khusus harus berinteraksi dengan dunia luar.

Sekolah yang mengadakan pendidikan inklusif harus menyiapkan pendidikan, pengawasan yang lebih ekstra, guru pembimbing khusus, serta sarana dan prasarana yang memadai. Untuk guru pembimbing khusus, harus membuat kurikulum modifikasi sesuai kemampuan peserta didik tersebut. Salah satu tugas guru pembimbing khusus adalah melakukan pendampingan serta bimbingan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran. Selain dilakukannya pengawasan, guru pembimbing khusus juga dianjurkan membuat catatan hasil perkembangan belajar setiap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut yang biasa disebut dengan catatan Anekdote. Dari beberapa hal yang telah peneliti paparkan, sekolah-sekolah yang menerapkan sistem inklusif harus siap memfasilitasi dengan baik hal-hal yang dibutuhkan para murid-murid berkebutuhan khusus agar tidak terjadi kegaduhan di sekolah tersebut. Untuk mewujudkan hal-hal yang telah peneliti paparkan maka sekolah-sekolah Inklusif harus juga menyiapkan dana. Ini juga dapat menjadi tanggung jawab lebih bagi sekolah yang menerapkan sistem tersebut. Oleh sebab itu Pendidikan Inklusif mempunyai banyak pengaruh atau dampak terhadap Sekolah yang menerapkannya. Salah satu dampak dari kebijakan Pendidikan Inklusif yang diterapkan di Sekolah Kharisma Makassar dapat dilihat pada peningkatan kecerdasan peserta didik berkebutuhan khusus walaupun beberapa indikator harus diturunkan dari standar kurikulum yang ada, sehingga banyak murid berkebutuhan khusus yang menjadi calon murid daftar tunggu untuk mendaftar di Sekolah Kharisma, namun karena keterbatasan Guru pendamping dan kapasitas kelas maka di Sekolah Kharisma ada kuota untuk murid-murid berkebutuhan khusus. Kuota murid berkebutuhan khusus maksimal 2 anak dalam 1 kelas.

Dalam hal ini, peneliti dapat melihat dari dua sisi, yaitu sisi masyarakat (murid dan orang tua) dan dari sisi sekolah mengenai pendidikan inklusif. Dari sisi murid berkebutuhan khusus dan reguler pasti banyak tantangan yang akan dilalui. Tetapi tantangan itu juga akan terasa mudah jika keduanya dapat bekerjasama dengan baik.

Murid berkebutuhan khusus juga pastinya akan memiliki kebahagiaan sendiri ketika berinteraksi dengan murid regular atau non berkebutuhan khusus. Sedangkan dari sisi pihak sekolah jika pendidikan inklusi diterapkan tentunya akan menciptakan tantangan baru bagi pihak sekolah untuk menjalani sistemnya agar dapat berjalan dengan baik. Pihak sekolah mungkin akan mengalami beberapa kesulitan, diantaranya pemberian bimbingan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus, penggabungan peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik yang regular serta pengadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu diperlukannya orang yang ahli untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan Pendidikan Inklusif, penerapan kebijakan pendidikan inklusif, dan aspek pendukung serta penghambat dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Kharisma Makassar khususnya terhadap Sekolah dan Masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dampak kebijakan Pendidikan Inklusif terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus di Sekolah Kharisma Makassar?
- 2) Bagaimana penerapan kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Kharisma Makassar?
- 3) Apa saja aspek pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Kharisma Makassar?

Adanya tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dampak kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma Makassar khususnya terhadap Sekolah dan Masyarakat.
- 2) Untuk mengetahui penerapan kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma Makassar?
- 3) Untuk mengetahui aspek pendukung serta penghambat dalam penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Kharisma Makassar yang berlangsung pada bulan Desember 2023 sampai bulan Januari 2024. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sebab penelitian ini mengkaji peristiwa, orang dan objek yang berkaitan dengan Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif terhadap Sekolah dan Masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Yayasan, Kepala Sekolah TK, Kepala Sekolah SD, Orang tua murid, Guru, dan Pengawas Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer melalui observasi lapangan dan wawancara di lapangan. Sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen literatur yang berkaitan dengan dampak kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma Makassar. Adapun langkah dan tahapan Analisis data dalam Penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan

kembali kemudian dianalisis melalui tahap, *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing* atau *verification*.

HASIL DAN DISKUSI

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing (Garnida, 2015:48). Artinya, kelas reguler akan menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa terkecuali.

Sementara itu, Ilahi (2013: 24) menyatakan bahwa pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Semua anak tanpa terkecuali dapat dengan mudah memperoleh pendidikan yang sesuai. Mengapa pendidikan inklusif dilakukan? tujuannya agar para penyandang kesulitan membaca dan menulis mampu mengatasi kelemahannya dan mampu bermasyarakat dengan baik.

Syamsul (2010), menyebutkan Anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) Memiliki kelainan sensori, seperti cacat penglihatan atau pendengaran,
- 2) deviasi mental, termasuk gifted dan retardasi mental,
- 3) kelainan komunikasi, termasuk problem bahasa dan ucapan,
- 4) ketidakmampuan belajar, termasuk masalah belajar serius karena kelainan fisik,
- 5) perilaku menyimpang atau gangguan emosional,
- 6) cacat fisik dan kesehatan.

Berkaitan dengan klasifikasi ABK, Garnida (2015) menyebutkan adanya beberapa kelompok ketunaan yang meliputi:

- 1) Tunanetra
- 2) Tunarungu/dan atau tunawicara
- 3) Tunagrahita
- 4) Tunadaksa
- 5) Tunalaras
- 6) Anak gangguan belajar spesifik
- 7) Anak lamban belajar (slow learner)
- 8) Seorang anak cerdas istimewa dan bakat istimewa (CIBI)
- 9) Anak autis (Autisme).

Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma Makassar

Berdasarkan penelitian di lapangan, untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik yang berkebutuhan khusus maka diterapkan model pendidikan reguler *full inclusion*. Dalam model ini peserta didik yang berkebutuhan khusus digabungkan dalam satu ruangan dengan peserta didik yang reguler dalam proses pembelajaran berlangsung. Dalam model pembelajaran ini murid berkebutuhan khusus juga menggunakan kurikulum yang sama dengan murid reguler hanya saja ada beberapa indikator dalam kurikulum tersebut yang harus di turunkan dalam pembelajaran anak berkebutuhan

khusus. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Guru Pendamping Khusus (GPK) (AL) berikut ini:

“Pada saat proses pembelajaran berlangsung murid berkebutuhan akan saya damping dari pagi sampai selesai pembelajaran dan materi yang saya sajikan kepada murid yang berkebutuhan khusus sama dengan materi murid regular lainnya, hanya eksekusinya yang agak sedikit berbeda dengan murid regular sebab ada beberapa indikator yang saya turunkan demi meningkatkan kecerdasan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Contohnya: apabila murid regular indikatkan menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar maka untuk murid berkebutuhan khusus saya turunkan menjadi menunjuk benda-benda yang ada di sekitar”.

Hal yang sama sejalan dengan hasil wawancara dengan Guru Wali Kelas (HN) yang di kelasnya ada murid berkebutuhan khusus. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saat proses belajar mengajar, saya sebagai wali kelas tetap harus memperhatikan murid yang berkebutuhan khusus yang ada di kelas saya, walaupun murid tersebut memiliki guru pendamping tapi saya tetap harus memantau dan mengetahui perkembangan murid tersebut karena murid tersebut ada di kelas saya. Selain itu saya juga harus terus menstimulus murid-murid regular yang ada di kelas saya supaya mereka selalu membantu temannya yang berkebutuhan khusus dalam proses belajar supaya temannya yang berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik”.

Dari hasil wawancara kedua informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak mudah sebab peserta didik yang berkebutuhan khusus rata-rata belum mampu mengikuti standar kurikulum yang telah di ramu oleh pemerintah sehingga hampir semua indikator-indikatornya masih harus di turunkan. Namun dalam hal ini Sekolah Kharisma masih terus berupaya untuk bisa meningkatkan kecerdasan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu yang dapat dilakukan melalui Pendidikan khusus maupun Pendidikan inklusif.

Saat peneliti mengadakan observasi ke sekolah kharisma sudah dapat terlihat upaya untuk meningkatkan adaptasi dan sosialisasi peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan peserta didik yang regular dari upaya menggabungkan murid tersebut dalam satu kelas yang sama. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah unit SD (TF) yang menyatakan bahwa :

“Dalam upaya meningkatkan adaptasi dan sosialisasi antara murid yang berkebutuhan khusus dengan murid regular dengan cara menggabungkan mereka dalam satu kelas sehingga murid-murid yang berkebutuhan khusus dapat terbiasa dengan teman-temannya yang regular, begitu pun sebaliknya murid-murid yang regular dapat menghargai temannya yang berkebutuhan khusus dan sayang sama mereka tanpa harus membedakan”.

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi

pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu (Fatkuroji, 2017).

Istilah kebijakan pendidikan banyak disamakan dengan istilah perencanaan pendidikan (education planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan education), pengaturan pendidikan (education regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education), serta istilah-istilah lainnya, lebih lanjut kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan (Arif Rohman 2012).

Berdasarkan penelitian di lapangan upaya untuk meningkatkan penyaluran minat dan bakat peserta didik yang berkebutuhan khusus di Sekolah Kharisma tetap di jembatani oleh pihak Sekolah. Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Sekolah unit KB-TK Kharisma (MD) yang mengatakan :

“Dalam menyalurkan minat dan bakat, semua murid mempunyai hak yang sama. Dalam hal ini kami tetap mengikut sertakan murid yang berkebutuhan khusus ketika ada hal-hal yang menyangkut bakat dan minat yang akan ditampilkan atau dilaksanakan di Sekolah bahkan di luar Sekolah. Misalkan kami mendapat undangan perform di mall maka semua murid yang mau ikut dan diizinkan oleh orang tuanya, kami ikutkan termasuk murid yang berkebutuhan khusus. Walaupun terkadang murid-murid yang berkebutuhan khusus agak sulit ketika dilatih dan dibimbing oleh Guru Pendamping Khususnya (GPK) tp tetap kami upayakan untuk ikut”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus di Sekolah Kharisma tetap diberi akses untuk menyalurkan minat dan bakat mereka sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki walaupun dalam membimbing dan melatih minat dan bakat mereka Guru Pendamping Khusus membutuhkan kesabaran dan perjuangan.

Sehubungan dengan kemandirian anak-anak yang berkebutuhan khusus juga harus terus di latih dan di bimbing, sebab hal ini merupakan hal utama yang harus ditargetkan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus di Sekolah Kharisma. Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dengan Guru pendamping Khusus kelas 3 (A) yang mengatakan:

“Untuk target utama kami para Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam menangani dan mendampingi murid-murid yang berkebutuhan khusus adalah tingkat kemandirian ini merupakan hal utama yang harus di ajarkan pada murid-murid berkebutuhan khusus misalkan dalam hal makan, berpakaian dan toilet training. Sebab mereka akan bertumbuh besar dan tidak bisa selalu bergantung kepada orang lain. Makanya mereka harus bisa melakukan sendiri hal-hal yang telah saya sebutkan tadi”.

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu orang tua peserta didik yang berkebutuhan khusus yang mengatakan bahwa :

“Saya setuju kalau hal kemandirian harus menjadi target utama bagi anak-anak kami yang berkebutuhan khusus sebab kami sebagai orang tua belum tentu akan selalu ada di samping anak-anak kami. Makanya mereka harus bisa mandiri”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang paling utama menjadi target peserta didik berkebutuhan khusus adalah kemandirian bukan kognitif.

Teknik Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Kharisma Makassar

Metode bimbingan dan pembelajaran yang digunakan Guru dalam kelas inklusi ada beberapa macam seperti, metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi dan berbagai metode yang lain sesuai dengan materi yang akan di sajikan pada hari itu. Dalam hal ini wali kelas menyajikan materi ke murid-murid secara bersamaan baik untuk anak regular maupun untuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan guru Wali Kelas 4 (RA) sebagai berikut :

“Dalam penyajian materi metode yang saya gunakan pada dasarnya sama antara murid regular dan murid berkebutuhan khusus, hanya saja untuk murid -murid yang berkebutuhan khusus nanti akan di bantu dan dibimbing oleh Guru Pendamping Khususnya (GPK) dalam pengekseskusiaan materi sesuai dengan indikator yang mereka sudah turunkan sesuai kemampuan murid berkebutuhan khusus yang mereka pegang. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan tetap menggunakan standar yang sama antara murid berkebutuhan khusus dan murid regular”.

Untuk murid-mirid regular dan berkebutuhan khusus akan memperoleh hak pembelajaran yang sama dari Wali kelas. Walaupun untuk murid berkebutuhan khusus akan lebih ekstar di bantu oleh Guru Pendamping Khususnya (GPK).

Model pelaksanaan Pendidikan Inklusi dengan model Pendidikan regular full inclusion. Dalam hal ini peserta didik yang berkebutuhan khusus digabungkan dalam satu ruangan dengan anak- anak regular dalam proses pembelajaran berlangsung. Model ini juga disetujui oleh Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah unit KB-TK dan SD pada Sekolah Kharisma. Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Yayasan (ZO) sebagai berikut:

“Dalam model pelaksanaan pendidikan inklusif regular full inclusion dapat sangat membantu untuk prosese perkembangan pada anak-anak berkebutuhan khusus, utamanya pada perkembangan sosialisasinya. Hal ini yang mendorong saya mendukung model pembelajaran ini di Sekolah Kharisma. Model ini juga bermanfaat untuk anak-anak regular untuk bisa lebih menghargai teman-temannya yang berkebutuhan khusus dan tidak membully mereka. Saya sebagai ketua Yayasan sangat mensupport program Pendidikan Inklusi sebab di zaman sekarang bagitu banyak spektrum-spektrum diagnose untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kami sebagai Yayasan Pendidikan akan selalu membuka pintu untuk murid-murid berkebutuhan khusus yang mau sekolah di Sekolah Kharisma dengan beberapa kesepakatan dengan orang tua demi mewujudkan perkembangan anak yang lebih positif”.

Sekolah Kharisma menggunakan Model Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dengan model regular full inclusion Dimana murid-murid yang berkebutuhan khusus di gabung dengan murid regular dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan kurikulum yang sama. Untuk Murid-murid yang berkebutuhan khusus kurikulumnya di modifikasi dengan sebutan Individualized Educational Program (IEP) atau biasa disebut juga dengan istilah Program Pembelajaran Individual (PPI) Dimana beberapa indikator-indikatornya sudah diturunkan oleh Guru Pendamping Khusus(GPK) sesuai dengan kemampuan murid-murid berkebutuhan khusus yang mereka pegang.

Guru Pendamping Khusus (GPK) merupakan guru yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus dan mempunyai tugas untuk menjembatani kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus dengan guru mata pelajaran atau guru kelas dalam proses belajar mengajar serta melakukan beberapa tugas khusus yang berhubungan dengan murid berkebutuhan khusus. Dalam hal ini Sekolah Kharisma sebagai Sekolah Inklusif harus menyediakan Guru Pendamping khusus (GPK) untuk mendampingi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang telah mendaftar sebagai peserta didik. Namun dalam hal penyediaan GPK tidak mudah, hal ini diutarakan oleh Konselor Sekolah Kharisma unit KB-TK dan SD (NFJA) sebagai berikut

“Saya selaku konselor sekolah yang juga turut serta dalam merekrut guru termasuk Guru Pendamping Khusus agak kesulitan menentukan Guru yang cocok dalam visi dan misi Sekolah Kharisma walaupun banyak yang melamar tapi untuk yang memenuhi standar sangat minim. Sangat minim guru-guru yang berkompeten dan mau belajar dalam memodifikasi kurikulum yang indikatornya diturunkan sesuai kemampuan murid-murid yang berkebutuhan khusus, sekalipun mereka dari Fakultas Pendidikan Luar Biasa. Sehingga dalam hal ini kami harus memberlakukan sistem Trial terhadap Guru Pendamping Khusus yang baru kami rekrut untuk mengetahui cara menghandle murid yang berkebutuhan khusus. Biasanya masa Trialnya 3 sampai 6 bulan baru akan di angkat menjadi guru tetap”.

Penyediaan guru pendamping khusus bukan hal yang mudah dan butuh orang yang professional dalam hal perekrutan supaya Guru Pendamping Khusus yang di rekrut memiliki kualitas yang baik.

Fowler (2014:76-77) dan Anderson (2015, p.125) menyatakan bahwa syarat utama agar sebuah permasalahan pendidikan dapat diatasi adalah isu tersebut harus menjadi agenda penting bagi para pengambil kebijakan. Kenyataan yang didapat dari lapangan bertentangan dengan pernyataan di atas. Pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan tidak memberikan arahan yang jelas untuk pendidikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menerapkan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma Makassar

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi wajib memiliki kompetensi pembelajaran bagi peserta didik pada umumnya maupun berkebutuhan khusus. Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi, wajib memiliki guru pembimbing khusus. Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, tenaga pendidik adalah pendidik profesional

yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan GPK. Standar pendidikan inklusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 ayat 5-7 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Ada beberapa hal yang menjadi factor pendukung dan penghambat dalam menerapkan Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Kharisma, seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasaana, dan partisipasi masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) di Sekolah Kharisma, untuk pelaksanaan pendidikan Inklusif Sekolah membutuhkan SDM yang berkompeten dan paham tentang Pendidikan Inklusif. Dalam hal ini semua SDM yang ada di Sekolah harus paham dalam menghadapi murid-murid yang berkebutuhan khusus, hal ini juga yang harus jadi pertimbangan dalam perekrutan SDM (Sumber Daya Manusia) seperti yang diutarakan oleh Konselor Sekolah Kharisma (NFJA) sebagai berikut :

“Saya selaku konselor sekolah yang juga turut serta dalam merekrut guru termasuk Guru Pendamping Khusus agak kesulitan menentukan Guru yang cocok dalam visi dan misi Sekolah Kharisma walaupun banyak yang melamar tapi untuk yang memenuhi standar sangat minim. Sangat minim guru-guru yang berkompeten dan mau belajar dalam memodifikasi kurikulum yang indikatornya diturunkan sesuai kemampuan murid-murid yang berkebutuhan khusus, sekalipun mereka dari Fakultas Pendidikan Luar Biasa”.

Dari pernyataan di atas juga di perkuat oleh pernyataan Kepala Sekolah unit SD(TF) yang mengatakan bahwa:

“Selain kendala di perekrutan guru yang sudah di rekrut atau yang sudah ada di lingkungan Sekolah Kharisma masih ada yang butuh bimbingan dalam menangani murid berkebutuhan khusus jadi saya selaku kepala Sekolah masih banyak yang harus saya benahi pada guru-guru saya”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di Sekolah Kharisma masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma Makassar.

Dalam hal ini pelaksanaan model Pendidikan Inklusi akan berjalan sesuai standar dan harapan apabila di tujang dengan keuangan yang memadai. Namun dalam hal ini salah satu kendala yang dihadapi oleh Sekolah Kharisma Makassar adalah kendala keuangan di mana seperti yang di utarakan oleh bendahara Yayasan (Informan 11) sebagai berikut :

“Saya selaku bendahara Yayasan mendukung program Pendidikan Inklusi namun sebagai bendahara, dalam hal pelaksanaan Pendidikan Inklusi juga membutuhkan

dana yang tidak sedikit sebab dari segi Guru Pendamping Khusus (GPK) menuntut gaji yang lumayan besar ketika mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus sedangkan pembayaran uang Sekolah murid-murid yang berkebutuhan khusus tidak sebanding dengan gaji para GPK nya oleh sebab itu Yayasan masih mensubsidi gaji para GPK di Sekolah Kharisma. Hal ini juga yang menyebabkan terbatasnya kuota anak-anak berkebutuhan khusus yang di terima di Sekolah Kharisma Makassar yaitu hanya 2 anak per kelas. Belum lagi dalam penyediaan media ajar untuk murid-murid berkebutuhan khusus harganya tidak murah sebab harus media yang aman untuk mereka sedangkan sudah tidak ada bantuan dana dari pemerintah untuk menunjang Pendidikan Inklusif itu sendiri. Semoga hal ini bisa jadi pertimbangan Pemerintah kedepannya”.

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma khususnya yang murid-murid berkebutuhan khusus Tingkat KB-TK. Namun kenyataannya di lapangan sarana dan prasarana masih kurang di Sekolah Kharisma Makassar. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah unit KB-TK Kharisma berikut ini:

“Saya selaku Kepala Sekolah sudah sangat mengapresiasi sarana dan prasarana yang telah diadakan oleh pihak Yayasan dalam memenuhi konteks belajar murid-murid yang berkebutuhan khusus namun dari sarana dan prasarana tersebut masih ada beberapa yang kurang contohnya belum ada thrompolin yang akan digunakan untuk meminimalisir keaktifan anak-anak berkebutuhan khusus yang terindikasi Hyper Aktif. Namun hal ini akan diupayakan oleh Yayasan dalam pengadaannya. Semoga bisa cepat terealisasi”.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah yang bersangkutan dan ditambah aksesibilitas serta media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Disamping menggunakan sarana prasarana seperti yang digunakan sekolah reguler, anak membutuhkan layanan pendidikan khusus, perlu pula menggunakan sarana prasarana serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak. Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma, selain tiga hal yang telah diutarakan di atas sekolah juga membutuhkan partisipasi Masyarakat, khususnya Masyarakat di sekitar Sekolah. Namun dalam hal ini masyarakat belum memahami mengenai paradigma Pendidikan inklusif sehingga belum dapat berpartisipasi penuh di dalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah unit SD (WD) sebagai berikut:

“Saya selaku Wakasek melihat peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma masih kurang sebab di kalangan masyarakat pada umumnya anak-anak yang berkebutuhan khusus kebanyakan bersekolah di Sekolah Luar Biasa(SLB) sehingga mereka masih merasa awam ketika ada anak-anak yang berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler”.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Kharisma Makassar antara lain Sumber Daya Manusia(SDM), Keuangan, sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat yang belum memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Inklusif terdapat beberapa dampak kebijakan pendidikan Inklusif tersebut di Sekolah Kharisma Makassar yang meliputi peningkatan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus seperti adaptasi, penyaluran minat dan bakat, serta kemandirian. Ada beberapa teknik penerapan kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma Makassar, yaitu pemberian bimbingan khusus, penggabungan peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik yang reguler, dan menyediakan Guru Pendamping Khusus (GPK) kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, faktor Pendukung dalam penerapan Pendidikan Inklusif di Sekolah Kharisma Makassar adalah sumber daya yang memadai, keuangan yang cukup, dan sarana dan prasarana yang memadai. Semenara faktor penghambatnya adalah partisipasi masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar pengurus Yayasan juga ikut mengupgrade diri tentang Pendidikan inklusi seperti ikut pelatihan-pelatihan supaya semua unsur Sekolah bahkan sampai ke Tingkat Yayasan paham mengenai Pendidikan Inklusif serta memberi akses untuk penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat di sekitar Sekolah dalam hal Pendidikan Inklusif. Untuk kepala sekolah, seharusnya lebih berupaya lagi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Kharisma. Untuk guru agar terus belajar dalam menangani dan mengenal karakteristik murid-murid yang berkebutuhan khusus sehingga semua guru bisa tahu dan paham dalam menangani murid-murid berkebutuhan khusus. Untuk pengawas sekolah, hendaknya mampu menjembatani Sekolah-Sekolah yang ada di bawah pengawasannya untuk dibantu dalam hal pengadaan bantuan dari Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan setempat untuk pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah-sekolah yang membutuhkan seperti Sekolah Kharisma Makassar. Untuk orang tua murid agar bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para guru demi perkembangan positif anak-anak. Kalau bisa jangan hanya mengandalkan Sekolah saja tapi orang tua juga harus membantu di rumah dalam segala aspek pembelajaran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agustan, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nasir, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II atas bimbingan dan masukannya selama ini demi penyempurnaan artikel ini.

REFERENSI

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: an introduction (8th ed.)*. Wadsworth: Cengage Learning
- Arif, Rohman. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Fatkuroji, F. (2017). *Analisis Kebijakan Pendidikan Berbasis Riset*. Semarang: Garuda.
- Fowler, F. C. (2014). *Policy studies for educational leaders: An introduction (4th ed.)*. New Jersey: Pearson Education.
- Garnida. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Refika Aditama.
- Ilahi, M.T. (2013). *Pendidikan inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Syamsul, Bahri Thalib. (2010). *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.